

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dalam pemanfaatan potensi-potensi di daerahnya. Pembentukan desentralisasi fiskal ini bertujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah mengelola daerahnya dan mengurangi subsidi pemerintah, serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerah. Menurut Kaho (2001:88) terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, keuangan daerah yang dikelola dengan baik, teknologi yang memadai, dan manajemen yang baik dalam mengelola daerah serta menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masalah yang masih banyak dihadapi oleh seluruh daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu kemiskinan, sector pertanian dan inflasi. Kemiskinan menjadi masalah baik pada daerah perkotaan maupun pedesaan. Kemiskinan terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih memiliki kemampuan rendah dalam membuka lapangan pekerjaan dan tidak banyak peluang masyarakat untuk mendapat pekerjaan serta banyaknya pekerja yang di-PHK karena para pengusaha kekurangan modal dan gulung tikar.

Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan dalam keberhasilan pembangunan nasional, seperti dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor dan penekanan inflasi Simatupang, (2012) dimana gerakannya diantisipasi dan diselaraskan searah dengan dinamika pembangunan yang terjadi. Sejak Pelita VI orientasi pembangunan pertanian beralih dari fokus peningkatan produksi semata kearah orientasi pendapatan (kesejahteraan) masyarakat pertanian, terutama pertanian di pedesaan. Untuk itu, pengembangan agribisnis telah menempati posisi sentral di dalam pembangunan pertanian Baharsyah, (2011). Sebagai relevansinya adalah upaya memberi masukan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian selanjutnya dengan mengkaji dampak kebijaksanaan tersebut di tingkat mikro dan makro terhadap perbaikan kesejahteraan kaum petani.

Apabila daya beli petani karena pendapatan yang diterima dari kenaikan harga produksi pertanian yang dihasilkan lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka hal ini mengindikasikan bahwa daya dan kemampuan petani lebih baik atau tingkat pendapatan petani lebih meningkat. Alat ukur daya beli petani selintas dapat menunjukkan tingkat kesejahteraannya dirumuskan dalam bentuk Nilai Tukar Petani (NTP) yang terbentuk oleh keterkaitan yang kompleks dari suatu sistem pembentuk harga, baik harga yang diterima maupun harga yang harus dibayar petani. Dengan kata lain, NTP didefinisikan sebagai nisbah antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani, sehingga merupakan ukuran kemampuan 7 daya tukar produk yang dihasilkan terhadap produk dan jasa yang mampu dibeli oleh rumah tangga petani, baik

untuk biaya input usaha tani maupun biaya konsumsi rumah tangga petani. Peningkatan nilai kemampuan riil petani mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani atau sebaliknya.

Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi namun upaya tersebut masih belum cukup dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan yang semakin tinggi disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang tinggi. Menurut Santosa (2013:26) peningkatan kemiskinan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi yaitu pemerintah berperan dalam membuat kebijakan fiskal sedangkan sektor swasta dalam pengembangan atau membuka kesempatan kerja dan masyarakat sebagai sumber daya manusia yang merupakan input produksi.

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan. Salah satu sarana pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi sehingga kemiskinan merupakan salah satu akar permasalahan dari masalah rendahnya pembangunan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir disemua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan telah menjadi persoalan global yang kompleks dan tak kunjung usai, sebab kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Termasuk di Indonesia, dimana kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalahmasalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut.

Inflasi merupakan variabel makro ekonomi selain dari pertumbuhan dan pengangguran semestinya mendapatkan perhatian yang penuh dari Pemerintah dalam hal menjaga tingkat kestabilannya.

Tinggi atau rendahnya tingkat NTP dipengaruhi oleh tingkat Inflasi. Persoalan Inflasi membawa dampak buruk bagi kondisi perekonomian suatu

bangsa, selain itu akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap secara otomatis pendapatan mereka berkurang seiring dengan naiknya harga-harga yang berlaku dimasyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung, inflasi yang terjadi akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meski demikian pengaruh inflasi dalam skala mikro atau makro dapat bersifat positif atau negative.

Kemiskinan dianggap berpengaruh terhadap NTP karena Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) jika dihubungkan dengan negara berkembang yang dominasi adalah petani maka kemiskinan akan memiliki dampak terhadap nilai tukar dari petani ataupun nilai tukar dari kegiatan usaha dalam kondisi yang baik ataupun tidak

Menurut Ruauw (2010:7), semakin tinggi tingkat NTP maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan kehidupan petani. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan nilai tukar petani maka kemampuan petani untuk melakukan belanja keperluan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga yang lain dapat terpenuhi, begitupun sebaliknya. Menurunnya nilai tukar petani menunjukkan bahwa kesejahteraan petani menurun dan pendapatannya berkurang

Menurut Deffrinaca (2017), kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling

mendasar dalam kehidupan. Selanjutnya kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problem kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan pendapatan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Kemiskinan merupakan keadaan di mana pendapatan dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh kerana itu sering kali upaya untuk menuntuskan kemiskinan hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin.

Badan Pusat Statistik (2018) menjabarkan inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Supriyanto, (2007).

Nilai Tukar Petani, Tingkat Kemiskinan dan Inflasi di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020 seperti pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Nilai Tukar Petani, Tingkat Kemiskinan dan Inflasi**  
**Provinsi Jambi Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Tukar Petani (%)</b>	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>	<b>Indeks Harga Konsumen (%)</b>
2015	95,72	8,86	121,69
2016	101,09	8,41	127,21
2017	102,64	8,19	130,62
2018	97,13	7,92	134,57
2019	100,85	7,60	136,28
2020	117,83	7,58	106,23

*Sumber : BPKPD dan BPS Provinsi Jambi, Tahun 2020.*

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bawah NTP (Nilai Tukar Petani) provinsi jambi mengalami fluktuasi dan nilai tertinggi adalah tahun 2020 dimana tahun 2015 sebesar 95,72 % tahun 2016 naik menjadi 101,09 % tahun 2017 naik menjadi 102,64 % tahun 2018 turun menjadi 97,13 tahun 2019 naik menjadi 100,85 % tahun 2020 naik menjadi 117,83 % semakin tinggi tingkat NTP maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan kehidupan petani.

Selanjutnya pada tingkat kemiskina Provinsi Jambi cenderung menurun setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Provinsi Jambi adalah sebesar 8,86%, pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Jambi adalah sebesar 8,41%, pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Provinsi Jambi adalah sebesar 8,19%, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Provinsi Jambi adalah sebesar 7,92%, pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Provinsi Jambi adalah sebesar 7,60%, dan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Provinsi Jambi adalah sebesar 7,58%.

Selanjutnya pada indeks harga konsumen Provinsi Jambi cenderung naik dari tahun 2015 hingga 2019 dan terjadi penurunan (deflasi) pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2015 indeks harga konsumen Provinsi Jambi adalah 121,69, pada tahun 2016 indeks harga konsumen Provinsi Jambi adalah 127,21, pada tahun 2017 indeks harga konsumen Provinsi Jambi adalah 130,62, pada tahun 2018 indeks harga konsumen Provinsi Jambi adalah 134,57, pada tahun 2019 indeks harga konsumen Provinsi Jambi adalah 136,28, dan pada tahun 2020 indeks harga konsumen Provinsi Jambi adalah 106,23.

Mengingat Provinsi Jambi yang dikenal sebagai daerah agraris yang mana perekonomiannya sangat tergantung dari sektor pertanian yang pendapatannya bersifat musiman setiap kali panen dan sangat tergantung pada kondisi alam. Penekanan Tingkat Kemiskinan dan Inflasi semestinya dapat digunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Apa lagi dari Penanggulangan Kemiskinan dan Inflasi yang terkait langsung dengan program kerja pemerintah daerah yang salah satunya diprioritaskan bagi masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan teori Rostow bahwa kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam rangka pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN INFLASI TERHADAP NILAI TUKAR PETANI DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015-2020”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Jambi tahun 2015-2020 baik secara parsial maupun simultan?
2. Berapa Besar pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Jambi tahun 2015-2020 baik secara parsial maupun simultan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Jambi tahun 2015-2020 baik secara parsial maupun simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Jambi tahun 2015-2020 baik secara parsial maupun simultan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis.
  - a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
  - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori

yang diperoleh, sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan data dan informasi serta gambaran mengenai Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Jambi dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

